

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, J. (2012) *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2019) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 11th edn. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2005) *Konstitusi dan Konstitualisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Butarbutar, E.N. (2018) *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Edited by R.F. Kurnia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, (2015) *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, Y. (2016) *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huntington, S.P. (2001) *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti.
- Indrati, M.F. (2007) *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, P.M. (2013) *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. 8th edn. Jakarta: Prenada Media Group.
- Saleh, I. A. (2014) *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press.
- Sardini, N.H. (2011) *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. 1st edn. Edited by R. Yasin. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Soemardjono, M.S.W. (1990) *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: UGM.
- Sugeng F. Istanto (2007) *Penelitian Hukum Edisi Pertama Cetakan Kesatu*. 1st edn. Yogyakarta: CV Ganda.
- Sulistiyono, A. (2018) *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenada Media Group.
- Sunaryati Hartono (2006) *Penelitian di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. 2nd edn. Bandung: Alumni.

Triningsih, A., Aditya, Z.F. and Fuadi, A.B. (2022) *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*. 2nd edn. Edited by Y.S. Hayati. Depok: Rajawali Pers.

Lon L Fuller, (1971) *The Morality of Law*, Edited by Sally Hargrove Sullivan. United States: Yale University.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Jurnal

- Bisariyadi, B. *et al.* (2016) ‘Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional’, *Jurnal Konstitusi*, 9(3), p. 531. Dapat diakses di: <https://doi.org/10.31078/jk936>.
- Fahmi, K. (2016) ‘Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu’, *Jurnal Konstitusi*, 12(2), p. 264. Dapat diakses di: <https://doi.org/10.31078/jk1224>.
- Hanafi, M.F. and Firdaus, S.U. (2022) ‘Implementasi Teori Hans Nawiasky dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia’, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(1), pp. 79–83. Dapat diakses di: <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i1.192>.
- Maksum, H. (2020) ‘Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah Ditinjau dari PERMA Nomor 2 Tahun 2019’, *Jurnal Jurnal Pembaharuan Hukum dan Pengadilan*, 2(1), pp. 4–16. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.178>.
- Kurniawan, D. (2023) ‘Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat’, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(1), pp. 97–110. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.97-110>.
- Pedju, R. (2017) ‘Politics, Islam, Islamic Trade Law, Nationalism: Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum (Perdata) dan Peradilan Tata Usaha Negara Secara Kompetensi Absolut (Absolute Competency)’, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, 21(1), pp. 10–24, <http://dx.doi.org/10.30984/pp.v21i1.735>.
- Sati, N.I. (2019) ‘Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia’, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), pp. 834–846. Dapat diakses di: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2343>.
- Setiadi, W. and Putri, C.W. (2020) ‘Penundaan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara’, *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), pp. 427. Dapat diakses di: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.514>.
- Siagian, A., Fajar, H.F. and Alify, R.F. (2022) ‘Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024’, *Jurnal Legislatif*, 5(2). Dapat diakses di: <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21026>.

Ramadan, S. (2017) 'Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian', *Jurnal RechtsVinding*, 6(1), pp. 69-87. Dapat diakses di: <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>.

Triono. (2017) 'Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019', *Jurnal Wacana Politik*, 2(2). Dapat diakses di: <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205>.

Tryas Fitriana, R. and Budyatmojo, W. (2022) 'Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024', *Jurnal Sovereignty*, 1(2), pp. 214–220. Dapat diakses di: <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i2.224>.

### Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d>, diakses pada 12 April 2023 pukul 16:41 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/02/17383511/pn-jakpus-perintahk-an-Pemilu-2024-ditunda-partai-prima-menangi-gugatan>, diakses pada tanggal 30 Maret pukul 23:40 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp3jlr8e3exo>, diakses pada tanggal 31 Maret pukul 01:04 WIB.

<https://portal.kesbangpol.bandung.go.id/komisi-pemilihan-umum-kpu/>, diakses pada tanggal 12 Desember Pukul 15:11 WIB.

<https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>, diakses pada tanggal 3 Desember Pukul 06:18 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d>, diakses pada tanggal 14 Desember Pukul 14:23 WIB.

### YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=STYeb0LDf90>, diakses pada tanggal 31 Maret pukul 00:19 WIB.

### Lainnya

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.